

Jurnal Ilmu Hukum



# SUMMA JUSTITIA

ISSN No. 2088 - 7264 Volume I No. 1 - Agustus 2011

## Politik Hukum Indonesia Dalam Kegiatan Bisnis Internasional

Dhaniswara K. Harjono

## Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia Dikaitkan Dengan Sistem Ekonomi

T.N. Syamsah

## Menghadapi Persaingan Perdagangan Bebas AC-FTA Melalui Pendekatan Konsep Perlindungan HKI

Edy Santoso

## Konstitusionalisme Pengisian Jabatan Gubernur Daerah Istimewa Ngayogyakarta

Margario Kamis

## Bohong Atau Tidak : Persoalan Memahami Data

Barita Simanjuntak

## Eksistensi & Kedudukan Masyarakat Adat Beserta Hak Asal Usulnya Dalam Tata Hukum Nasional

Hendrik Hattu

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA



## DAFTAR ISI

### POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM KEGIATAN BISNIS INTERNASIONAL

Dhaniswara K Harjono ..... 1-7

### HUKUM PERSAINGAN USAHA DI INDONESIA DIKAITKAN DENGAN SISTEM EKONOMI KERAKYATAN

TN Syamsah ..... 8-20

### MENGHADAPI PERSAINGAN PERDAGANGAN BEBAS AC-FTA MELALUI PENDEKATAN KONSEP PERLINDUNGAN HKI

Edy Santoso ..... 21-33

### KONSTITUSIONALISME PENGISIAN JABATAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA NGAYOGYAKARTA

Margarito Kamis ..... 34-51

### BOHONG ATAU TIDAK: PERSOALAN MEMAHAMI DATA

Barita Simanjuntak ..... 52-57

### EKSISTENSI & KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT BESERTA HAK ASAL USULNYA DALAM TATA HUKUM NASIONAL

Hendrik Hattu ..... 58-72

BIODATA PENULIS ..... 73

#### Penanggung Jawab:

Direktur Program Pasca Sarjana  
Universitas Kristen Indonesia

#### Ketua Pengarah:

Ketua Program Studi Magister Hukum  
Universitas Kristen Indonesia

#### Pimpinan Redaksi:

Anna Katharina

#### Dewan Editor:

Pipi Andry  
Abriana Kusuma Dewi

#### Editor Pelaksana:

Petrus Wahyu Pangayoman  
Murti H. Uspessy

#### Alamat Redaksi / Penerbit:

Jl. Diponegoro 86, Jakarta Pusat  
Telp. 021. 3920174  
Fax. 021. 3904462

---

Summa Justitia, memuat hasil kegiatan penelitian, pemikiran konseptual dan resensi bidang ilmu hukum. Media ini diterbitkan oleh Fakultas Hukum Program Pasca Sarjana universitas Kristen Indonesia, Jakarta.

---

Redaksi menerima naskah artikel laporan penelitian, artikel konseptual, dan resensi buku, sepanjang relevan dengan misi redaksi.

---

# POLITIK HUKUM INDONESIA DALAM KEGIATAN BISNIS INTERNASIONAL

Dhaniswara K. Harjono

## Abstrak

*Politik Hukum Indonesia pada hakikatnya merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum bisnis dalam transaksi internasional yang akan dibentuk atau yang sudah dibentuk. Arah dari politik hukum sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik serta perkembangan teknologi. Selain menjadi anggota WTO (World Trade Organization), kebijakan bisnis dan perdagangan internasional lain yang ditetapkan pemerintah adalah kerjasama kawasan regional dengan ikut sebagai pendiri AFTA (Asean Free Trade Area). Hingga saat ini sistem bisnis dan perdagangan Indonesia diatur sesuai dengan hukum bisnis dan perdagangan internasional yang diterjemahkan dalam bentuk perundangan di Indonesia yang diharapkan dapat melindungi kepentingan nasional.*

## Kata kunci:

Politik hukum, WTO/AFTA, Perdagangan Internasional.

## I. PENDAHULUAN

Kegiatan bisnis dan perdagangan internasional menjadi salah satu indikator mengenai kemajuan suatu negara. Semakin besar volume perdagangan internasional suatu negara menunjukkan semakin majunya negara tersebut. Seiring dengan meningkatnya transaksi bisnis, baik yang bersifat lokal, nasional, regional maupun global ini sudah barang tentu akan membawa konsekuensi perlunya aturan main (*rule of the game*) yang berupa regulasi yang dapat menjamin kontinuitas aktivitas dunia usaha itu sendiri secara adil dan pasti. Demi terciptanya keteraturan dan kepastian dalam mengakomodasi berbagai kepentingan para pelaku bisnis, hukum bisnis akan

menjadi kebutuhan yang tidak terelakkan sebagai pedoman fundamental.<sup>1</sup> Dalam globalisasi sekarang ini kegiatan bisnis internasional mengalami perkembangan yang sangat progresif. Hal tersebut dilatar belakangi oleh kemajuan dibidang teknologi komunikasi, industri dan transportasi serta munculnya hukum yang mengatur kegiatan bisnis tersebut. Dalam hal pembentukan hukum bisnis khususnya dalam bidang transaksi bisnis internasional sangat dipengaruhi oleh politik hukum dari Indonesia itu sendiri. Politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara.<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2005, hlm. 2.

<sup>2</sup> Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Ed.Revisi, Cet.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm.1.



Politik Hukum tersebut pada hakikatnya merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk maupun isi hukum bisnis dalam transaksi internasional yang akan dibentuk atau yang sudah dibentuk. Arah dari politik hukum sangat dipengaruhi oleh kepentingan politik serta perkembangan teknologi.

Politik hukum satu negara berbeda dengan politik hukum negara yang lain. Perbedaan ini disebabkan karena adanya perbedaan latar belakang kesejarahan, pandangan dunia (*world-view*), sosio-kultural, dan *political will* dari masing-masing pemerintah. Dengan kata lain, politik hukum bersifat lokal dan partikular (hanya berlaku dari dan untuk negara tertentu saja), bukan universal (berlaku seluruh dunia). Namun ini bukan berarti bahwa politik hukum suatu negara mengabaikan realitas dan politik hukum internasional.<sup>3</sup>

Dengan adanya progresifitas dari kemajuan teknologi telah melahirkan suatu hukum perjanjian (*The Law of Treaties*), mengimplikasikan kebijakan *Ad Hock* yang bersumber dari *regional trading* dan *bilateral trade arrangement*. Susunan dari *bilateral trade* ini telah menghasilkan cukup banyak *agreements* hasil kesepakatan banyak negara yang berisikan mengenai berbagai hal seperti hak atas kekayaan intelektual, perlindungan konsumen, anti monopoli, persaingan usaha tidak sehat, dan lain-lain. Kemudian *agreements* tersebut diterjemahkan kembali dalam hukum suatu negara. Selain itu keadaan internal suatu negara juga mendorong negara tersebut untuk membuat hukum nasional sesuai hukum internasional. Contoh

faktor internal: Indonesia memiliki tingkat konsumsi yang tinggi sedangkan produksi rendah sehingga impor bahan konsumsi lebih tinggi dibandingkan dengan transfer teknologinya. Saat ini Indonesia mengalami penurunan daya saing sehingga membuat para produsen menjual produk mereka dengan harga rugi. Hal ini menjadi pendorong mengapa Indonesia membangun hukum nasional yang mengadopsi hukum internasional sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan nasional Indonesia. Secara garis besar globalisasi telah menciptakan suatu bisnis dan perdagangan yang menekankan pada *liberalism* dan *protection*. Kegiatan bisnis dan perdagangan internasional menganut nilai-nilai *rationalism*, *materialism* dan *individualism* dan berakar dari akal manusia yang dapat berlaku kapan saja, di mana saja, dan bagi siapa saja. Hukum bisnis dan perdagangan internasional yang berlaku saat ini adalah hukum yang ditetapkan oleh WTO (*World Trade Organization*) yang menjunjung tinggi *liberalism*.

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana politik hukum Indonesia dalam kegiatan dan transaksi bisnis khususnya dalam bisnis internasional? Penelitian ini bertujuan untuk membahas pengaruh kebijakan politik hukum Indonesia dalam kegiatan bisnis. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan data sekunder dengan mengutamakan meneliti bahan kepustakaan terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

<sup>3</sup> Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Ed.1, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 33.



## II. PEMBAHASAN

### A. Sistem Perekonomian Indonesia

Sistem perekonomian Indonesia yang sejak jaman Orde Baru tidak terlalu mengutamakan peran hukum dalam kegiatan bisnis kini telah berubah karena dalam hubungan perdagangan internasional maka hukum menjadi hal yang sangat penting. Sistem dualisme yang terjadi sejak masa orde baru mengakibatkan munculnya *anomie* di kalangan masyarakat. Dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara tegas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia adalah perekonomian yang berdasarkan kerakyatan namun kontras dengan hal tersebut maka produk perundang-undangan yang dibuat justru lebih mengutamakan kepentingan individu yang didominasi oleh nilai materialistis. Hal ini menciptakan anomi, dan kebingungan untuk mematuhi hukum atau tidak sehingga muncul munculan ketidakpastian hukum bagi masyarakat.

Indonesia adalah negara hukum, sehingga sistem perekonomian bangsa pun diatur dalam hukum tersebut yaitu perekonomian kerakyatan. Namun dengan adanya arus globalisasi yang deras dapat membuka kemungkinan perubahan sistem perekonomian Indonesia menjadi liberal. Dalam hal ini dibutuhkan konsistensi yang kuat terhadap ideologi dan hukum Indonesia agar kebhinekaan tunggal ika tetap terjaga dalam usaha pengembangan perekonomian bangsa.

Dalam menjalankan usaha-usaha tersebut Indonesia menetapkan berbagai kebijakan ekonomi luar negeri yang berimplikasi pada kegiatan bisnis dan perdagangan internasional Indonesia. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah

Indonesia adalah:

1. *Multilateral Trading Agreement*, dengan bergabung dalam WTO.
2. *Regional Trading Agreement*, dengan bergabung dalam APEC dan AFTA.
3. Keikutsertaan sebagai negara pihak ketiga dalam USA-Singapore FTA.
4. *Bilateral Relationship*.

Kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah merupakan usaha nyata sebagai perlindungan terhadap perdagangan internasional yang dijalankan oleh bangsa Indonesia.

### B. World Trade Organization (WTO)

WTO adalah organisasi internasional yang mengatur kegiatan bisnis dan perdagangan antar negara untuk meningkatkan perdagangan dunia lebih fokus mengenai *free trade* dan *protectionism*.

Pembentukan WTO dinilai membuka peluang pasar yang luas karena para penanda tangan GATT sepakat untuk antara lain mengurangi tarif atas dasar MFN (*most favoured nation*), menerapkan secara ketat aturan non-tarif, khususnya dalam kaitan "*safeguards*", "*anti-dumping*", dan "*countervailing measures*", menetapkan kebijakan nasional yang transparan dan menetapkan aturan yang lebih jelas dalam perdagangan produk pertanian, sektor jasa, dan HAKI.

Sejak WTO menggantikan GATT, banyak negara-negara berkembang merasa "terintimidasi" karena hampir semua ketentuan yang berdasarkan *free trade* (perdagangan bebas) terasa lebih berpihak kepentingan ekonomi negara-negara industri maju yang sudah kaya dan barang-barang hasilnya "harus" tidak dihambat dalam memasuki pasar-pasar negara berkembang.<sup>4</sup>

<sup>4</sup> Moch. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Cet. I., Bandung, 2007, hlm. 9.



Akan tetapi, di lain pihak sebenarnya banyak manfaat bagi negara-negara berkembang dan negara tidak berkembang untuk masuk kedalam sistem *World Trade Organization* (WTO). Karena alternatif sebaliknya, malahan membuat negara tersebut semakin kacau. Sejarah juga membuktikan bahwa negara yang maju perekonomiannya adalah negara yang paling banyak menggunakan sistem persaingan pasar dan perdagangan bebas.<sup>5</sup>

Sistem perdagangan multilateral WTO diatur berdasarkan persetujuan yang berisi aturan-aturan yang telah disetujui dan ditandatangani oleh negara-negara anggota. Persetujuan tersebut berbentuk kontrak atau perjanjian yang mengikat bagi para negara anggota dan terikat untuk mematuhi isi tersebut. Indonesia sebagai salah satu anggota WTO berdasarkan persetujuan dari para anggota DPR dan juga Presiden telah melakukan ratifikasi melalui UU No.7 tahun 1994 yang secara garis besar mengatur :

- *Free Trade*: di bidang pertanian, tekstil dan pakaian.
- *Protectionism: anti-dumping* (penetapan harga dibawah biaya produksi atau menjual harga lebih murah ke luar negeri dibandingkan harga di dalam negeri), *SCM (Subsidies and Countervailing Measures)* dan *Safeguard* (tarif sementara yang digunakan untuk melindungi industri domestik dari keterbukaan kompetisi luar negeri).

WTO yang berdiri pada tahun 1995 menggunakan sistem perdagangan yang telah ada sebelumnya yaitu berasal dari *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) yang didirikan pada tahun 1948. Sistem tersebut memuat peraturan-

peraturan mengenai perdagangan dunia dan tarif perdagangan.

Globalisasi ekonomi dan perkembangan kerjasama ekonomi di dunia internasional telah menggambarkan adanya polarisasi dalam arti substansi permasalahan di bidang hubungan ekonomi sebagai dampak dari upaya pengaturan yang dilakukan oleh negara maupun pelaku ekonomi. Upaya pengaturan baik melalui WTO, regional melalui berbagai kerjasama kawasan, serta bilateral melalui berbagai kesepakatan kerjasama bilateral, ternyata tidak mengurangi munculnya berbagai penyimpangan dari norma-norma yang telah disepakati, antara lain terbukti dengan masih banyak negara terutama negara maju untuk menjatuhkan tuduhan "*dumping*" terhadap negara mitra dagangnya dan juga dalam upaya melindungi sektor industri tertentu menerapkan kebijakan "*safeguards*".

Akibat hukum dari diambilnya kebijakan nasional misalnya kebijakan Mobil Nasional (Mobnas) telah menempatkan pemerintah Indonesia dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam forum WTO karena dianggap menerapkan kebijakan diskriminatif melalui keringanan pajak impor atas komponen Mobnas sehingga Indonesia dikecam telah melanggar prinsip "*non-discriminatory*".

Struktur dasar persetujuan WTO meliputi:

1. Barang/goods (*General Agreements on Tariff and Trade/GATT*).
2. Jasa/services (*General Agreements on Trade and Services/GATS*).
3. Kepemilikan intelektual (*Trade-Related Aspects of Intellectual Properties/TRIPs*).

---

<sup>5</sup> Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, Cet.ke. 1, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 103.



#### 4. Penyelesaian sengketa (*Dispute Settlements*).

Dalam sistem perdagangan multi-lateral, ada beberapa prinsip dasar WTO yaitu:

##### a. Prinsip *The Most Favorite Nation* (MFN).

Yaitu peraturan yang melarang diskriminasi tarif antar dua negara atau lebih, dalam hal ini negara-negara tidak dapat mendiskriminasi mitra dagangnya. Melarang diskriminatif yang memberikan kepada negara-negara lain keuntungan, perlakuan baik, hak istimewa atau kekebalan dalam perdagangan yang diberikan kepada negara yang menerima perlakuan MFN. Tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang anggota lainnya.

##### b. Prinsip *National Treatment*.

Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama atas barang-barang impor dan lokal paling tidak setelah barang impor memasuki pasar domestik. Berdasarkan pasal III ayat 2 GATT menetapkan bahwa dalam penerapan pajak-pajak dalam negeri tidak boleh dibedakan antara pajak terhadap produk impor dan produk domestik.

##### c. Prinsip *Tariff Binding*.

Tarif ditetapkan berdasarkan konsesi timbal balik adalah bea masuk yang dikenakan terhadap barang impor yang dibuat pada barang tertentu dan barang tersebut terikat pada kesepakatan bersama.

##### d. Prinsip larangan "*Non-tariff Barriers*" (NTB).

Meliputi peraturan-peraturan maupun persyaratan-persyaratan yang menghambat arus impor barang, meliputi pembatasan-pembatasan kuantitatif.

##### e. Prinsip Liberalisasi Pasar yang Diskriminatif.

Liberalisasi pasar hanya diberlakukan untuk produk unggulan negara-negara maju, yaitu: *Non agriculture products market, Access/NAMA, Trade related-IPR protection, Trade related-foreign investment protection*.

Secara garis besar prinsip fundamental pada WTO adalah mengenai *non-discrimination (equal treatment)* dan juga prinsip *reciprocity*.

Dalam melakukan kegiatan perdagangannya, Indonesia berpatokan pada hukum yang ada baik hukum dalam negeri maupun hukum internasional. Semua hukum yang melandasi setiap kegiatan bisnis dan perdagangan di Indonesia telah disesuaikan dengan keadaan perdagangan internasional yang berjalan saat ini. Hal tersebut dimaksudkan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara-negara lain baik dari segi hukum maupun kemajuannya dan agar negara lain tetap merasa nyaman melakukan kegiatan perdagangan dengan Indonesia.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa Indonesia telah sah menjadi anggota WTO sejak tanggal 2 Nopember 1994. Indonesia mengadopsi secara nyata regim perdagangan internasional yang liberal dan mengambil berbagai langkah penting untuk mengurangi proteksi. Kini di Indonesia tarif impor yang ditetapkan tidak ada yang melebihi batas *rate* yang telah disusun dalam komitmen Indonesia di bawah persetujuan WTO.

Dalam pelaksanaan komitmen tersebut Indonesia telah membuat beberapa peraturan hukum baru dan institusi yang mendukung untuk menyesuaikan negaranya dengan keadaan dunia saat ini dengan mengumumkan



secara resmi kepada dunia bahwa Indonesia telah memberlakukan zona perdagangan bebas di negaranya yang dilandaskan pada peraturan – peraturan yang berlaku, antara lain yang menetapkan wilayah Sabang sebagai zona perdagangan bebas Indonesia.

Indonesia menetapkan wilayah Sabang sebagai zona perdagangan bebasnya dengan alasan bahwa Sabang merupakan wilayah yang mudah untuk dijangkau oleh negara-negara di dunia dan Sabang adalah wilayah pertemuan dua samudera yang dianggap sebagai tempat yang strategis untuk dijadikan wilayah perdagangan bebas.

Sejak tahun 1995 hingga saat ini Indonesia telah membuat undang-undang yang diadopsi dari persetujuan WTO yaitu peraturan mengenai pencantuman komposisi bahan baku untuk produk industri makanan dan minuman (*genetically engineered and irradiated ingredients*), ketentuan *anti-dumping* dan *countervailing duty*, *the safeguards* dan juga banyak membongkar mengenai kebijakan *non-tariff barriers*.

### **C. The ASEAN Free Trade Area (AFTA)**

AFTA merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan perdagangan bebas dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional bagi 500 juta penduduknya.<sup>6</sup>

AFTA dibentuk pada waktu KTT ASEAN Ke-IV di Singapura tahun 1992. Latar belakang mengapa terjadi kerjasama antar Negara ASEAN adalah karena adanya persamaan yaitu komoditi perdagangan yang sama dan memiliki

Negara tujuan ekspor yang sama. Sehingga AFTA memiliki tujuan untuk meningkatkan daya saing Negara ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi pasar dunia, untuk menarik investasi dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN.

Sebagai suatu kawasan perdagangan bebas ASEAN maka AFTA tidak ada hambatan tariff (bea masuk 0-5%) maupun hambatan *non-tariff* bagi Negara-negara anggota ASEAN. AFTA bertujuan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia, untuk menarik investasi, dan meningkatkan perdagangan antar anggota ASEAN dengan menciptakan pasar regional dengan 500 juta penduduknya.

Adanya aneka warna hukum dari berbagai Negara menyulitkan lalu-lintas perdagangan internasional. Maka sudah sejak lama orang mulai mengadakan berbagai usaha untuk memperkecil kesulitan-kesulitan yang timbul karena adanya aneka warna hukum dagang dari berbagai Negara itu.<sup>7</sup>

Akibat kesamaan antara komoditi dan tujuan antar Negara ASEAN membuat terjadinya kegagalan dalam usaha meningkatkan *comparative advantage* di antara para anggota. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya kenyataan bahwa terdapat konflik dengan kepentingan masing-masing dari setiap negara anggota. Dalam hal ini sebagai contoh adalah Filipina membatalkan komitmen untuk membebaskan *petrochemicals*, serta pertentangan antara Indonesia dengan Filipina mengenai impor gula.

Kerjasama perdagangan secara regional selain dilatarbelakangi oleh faktor persamaan komoditi dan tujuan

---

<sup>6</sup> Deperindag dalam Majalah Infomutu edisi Nopember 2002.

<sup>7</sup> Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Cet. Kedua, Bandung: PT Alumni, 2004, hlm.2-3.



juga dilakukan karena pengaruh dari beberapa faktor obyektif lain seperti:

- Faktor ekonomi, contohnya: Australia dengan New Zealand.
- Faktor komersial, contohnya: EU dengan Mexico.
- Faktor strategi, contohnya: EU dengan USA.
- Faktor ekonomi dan politik, contohnya: EU dengan Chile.
- Faktor yang merupakan kombinasi dari faktor di atas, contohnya: NAFTA.

#### **D. Politik Hukum Indonesia Dalam Kegiatan Bisnis Internasional**

Perkembangan perdagangan internasional telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dengan adanya progresifitas dari kemajuan teknologi telah melahirkan suatu hukum perjanjian (*The Law of Treaties*), mengimplikasikan kebijakan *Ad Hoc* yang bersumber dari *regional trading* dan *Bilateral Trade Agreement*. Susunan dari *Bilateral Trade* ini telah menghasilkan 28 *Agreements* hasil kesepakatan banyak Negara yang berisikan mengenai berbagai hal seperti Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan Konsumen, Anti Monopoli, dan lain-lain.

Indonesia yang telah melakukan ratifikasi sebagai anggota WTO atas persetujuan dari DPR dan Presiden memiliki kewajiban untuk melaksanakan sistem perdagangan internasionalnya sesuai dengan perjanjian WTO tersebut. Prinsip dasar dalam WTO adalah *non-discrimination* (*equal treatment*), bahwa setiap anggota WTO memiliki hak yang sama terutama mengenai *tariff*. Selain itu terdapat pula prinsip *reciprocity* yaitu hubungan timbal balik antar anggota yang melindungi semua kepentingan.

Indonesia dalam menjalankan sistim perdagangannya mengadopsi prinsip WTO tersebut dengan membangun hukum nasional yaitu UU No.7 tahun 1994 untuk kepentingan nasional. Melalui undang-undang tersebut system perdagangan internasional Indonesia akan menuju suatu sistim *Free Trade* dan juga memunculkan protecsianism. Namun dalam kenyataannya prinsip WTO justru bertentangan dengan apa yang ditetapkan. WTO hanya melindungi kepentingan Negara maju. Sedangkan bagi Negara berkembang justru terkesan merugikan karena kebebasan besar dalam perdagangan tersebut.

Dalam kerangka hubungan ekonomi dan perdagangan internasional, keberhasilan Indonesia meningkatkan ekspor dan pembangunan nasional juga akan tergantung pada perkembangan tatanan ekonomi dunia serta kemandirian system perdagangan internasional di samping kemampuan penyesuaian ekonomi nasional terhadap perkembangan yang ada. Salah satu faktor yang sangat mempengaruhi perekonomian dunia adalah tatanan atau sistem yang merupakan dasar dalam hubungan perdagangan antar Negara. Tatanan dimaksud adalah *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT). Manfaat keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan tersebut pada dasarnya bukan saja memungkinkan terbukanya peluang pasar internasional yang lebih luas, tetapi juga menyediakan kerangka perlindungan multilateral yang lebih baik bagi kepentingan nasional dalam perdagangan internasional, khususnya dalam menghadapi mitra dagang.<sup>8</sup>

Dalam kaitannya dengan sistem penyelenggaraan perdagangan antar

<sup>8</sup> Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO Aspek-Aspek Hukum dan Non-Hukum*, Cet. Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.225.



bangsa, Indonesia telah ikut serta dan berperan aktif dalam menyukseskan Putaran Uruguay dalam rangka GATT. Sebagai negara yang menganut sistem ekonomi terbuka dan mengandalkan ekspor sebagai penggerak pembangunan maka Indonesia sangat berkepentingan untuk ikut mewujudkan tatanan perdagangan dan sistem ekonomi internasional yang bebas, adil dan terbuka. Kepentingan Indonesia dalam hal ini yaitu tersedianya pasar bebas bagi barang dan jasa yang dihasilkan oleh Indonesia guna mendukung pembangunan nasional. Posisi Indonesia yakni mempertahankan dan memperluas pasar serta mengeliminasi hambatan-hambatan (*barriers*) ekspor. Indonesia selalu berupaya menjaga agar aturan dan segala produk hukum dalam sistem perdagangan dan ekonomi internasional tidak bersifat memihak dan diskriminatif sehingga Negara-negara maju tidak memaksakan kehendaknya secara sepihak yang dapat merugikan Negara-negara sedang berkembang.<sup>9</sup>

Selain menjadi anggota WTO kebijakan bisnis dan perdagangan internasional lain yang ditetapkan pemerintah adalah kerjasama kawasan regional dengan ikut sebagai pendiri AFTA (Asean Free Trade Area), melakukan hubungan bilateral dan terlibat dalam US-Singapore FTA yang memberikan dampak cukup besar berupa peningkatan tajam perdagangan illegal di Indonesia.

Hingga saat ini sistem bisnis dan perdagangan Indonesia diatur sesuai dengan hukum bisnis dan perdagangan internasional yang diterjemahkan dalam bentuk perundangan di Indonesia yang diharapkan dapat melindungi kepentingan nasional.

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Sebagai konsekuensi hukum atas ratifikasi yang ditempuh dengan persetujuan DPR dan Presiden maka Indonesia sebagai anggota WTO memiliki kewajiban untuk melaksanakan sistem perdagangan internasionalnya sesuai dengan perjanjian WTO tersebut. Prinsip dasar dalam WTO adalah *non-discrimination* (*equal treatment*), bahwa setiap anggota WTO memiliki hak yang sama terutama mengenai *tariff*. Selain itu terdapat pula prinsip *reciprocity* yaitu hubungan timbal balik antar anggota yang melindungi semua kepentingan. Indonesia dalam menjalankan sistem perdagangannya mengadopsi prinsip WTO tersebut dengan membangun hukum nasional yaitu UU No. 7 tahun 1994 untuk kepentingan nasional. Melalui undang-undang tersebut sistem perdagangan internasional Indonesia akan menuju suatu sistem *Free Trade* dan juga memunculkan *protectionism*. Dalam kenyataannya prinsip WTO dikhawatirkan hanya melindungi kepentingan negara maju, sedangkan bagi negara berkembang justru terkesan merugikan karena kebebasan besar dalam perdagangan tersebut.

#### B. Saran

Dalam menerapkan politik hukum maka dibutuhkan kehati-hatian yang tinggi agar kebijakan politik hukum yang diambil akan memberikan manfaat khususnya dalam transaksi bisnis internasional. Hal ini sangat penting karena politik hukum sebagai suatu garis kebijakan yang diberlakukan dengan pembuatan hukum

---

<sup>9</sup> N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Cet. Pertama, Malang : Bayumedia Publishing, 2006, hlm.3.



baru maupun dengan penggantian hukum lama dalam rangka mencapai tujuan Negara memiliki fungsi yang sangat

strategis khususnya dalam memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi para pelaku bisnis. ■

## DAFTAR PUSTAKA

- Ade Maman Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Hata, *Perdagangan Internasional Dalam Sistem GATT dan WTO*, Cet. Pertama, Bandung: PT Refika Aditama, 2006.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Perkasa, 2004.
- Moh. Faisal Salam, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Secara Nasional dan Internasional*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Munir Fuady, *Hukum Dagang Internasional*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- N. Rosyidah Rakhmawati, *Hukum Ekonomi Internasional Dalam Era Global*, Edisi Pertama, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Cet. 1, Bandung: Madar Maju, 2000.
- Sudargo Gautama, *Hukum Dagang Internasional*, Cet. Kedua, Bandung: Alumni, 2004.



# BIODATA PENULIS

## **Dhaniswara K Harjono**

Lahir di Jakarta 26 Oktober 1960. Menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Kristen Indonesia dan University Hawaii at Manoa, USA, Hawaii Pacific College, USA, Master of Business Administration-IEU, S2 Ilmu Hukum UNPAD, S3 Ilmu Hukum UNPAD. Kepala Program Studi Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia.

## **TN Syamsah**

Lahir di Lahat 27 Desember 1943, S1 Fakultas Hukum Universitas Sriwidjaya tahun 1970, S2 UNPAD tahun 2006, S3 UNPAD tahun 2008.

## **Edy Santoso**

Lahir di Bandung 10 April 1966, menyelesaikan pendidikan D3 Teknik Sipil Politeknik ITB tahun 1990, S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Budi Utomo, Jakarta, tahun 1995, Master Of Information and Technology Management University Wollongong, Australia, tahun 2002, Master Hukum Program Hukum Bisnis UNPAD, tahun 2006, S3 ilmu Hukum UNPAD.

## **Barita Simanjuntak**

Lahir Tarutung, 12 Juli 1971, lulus Doktor ilmu hukum (S3) tahun 2007 dari Universitas Indonesia, Magister Hukum (S2) Universitas Indonesia tahun 2000 dan Sarjana Hukum (S1) pada Universitas Sumatera Utara tahun 1994, saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

## **Hendrik Hattu, SH, MH**

Lahir di Haria, Saparua 19 Mei 1955, menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Patimura, tahun 1981, Pasca Sarjana Sam Ratulangi (S2), tahun 2006 dan Doktor Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin (S3) tahun 2010, saat ini menjabat sebagai Pembantu Rektor pada Universitas Pattimura,.

## **Dr. Margarito Kamis, SH, MH**

Lahir di Ternate, 27 April 1965, menyelesaikan pendidikan S1 pada Universitas Kahirun, Ternate tahun 1990, S2 pada Universitas Hasanuddin, Ujung Pandang, tahun 1993 dan meraih gelar Doktor pada Universitas Indonesia, Jakarta, tahun 2004. Dosen pada Magister Ilmu Hukum Universitas Kristen Indonesia, Universitas Airlangga dan Universitas Pattimura.

## **Pedoman Penulisan Naskah Untuk Jurnal Ilmiah "SUMMA JUSTITIA"**

1. Naskah diketik dalam tampilan halaman 2 (dua) kolom, 1,5 spasi, jenis Times New Roman ukuran 11, abstraks Times New Roman ukuran 10, jumlah 5-10 halaman ukuran kertas A4 (termasuk gambar, table, ilustrasi, dan daftar pustaka). Margin kiri 2 cm; margin atas 2 cm; margin bawah 2 cm dan margin kanan 2 cm (sesuai ukuran jurnal).
2. Belum pernah dipublikasikan melalui media lainnya.
3. Dapat berupa hasil penelitian atau studi kepustakaan yang bersifat obyektif, sistematis, analitis, dan deskriptif bidang ilmu hukum.
4. Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, sederhana, dan lugas.
5. Hindari pemakaian kata atau istilah asing yang dianggap tidak perlu.
6. Judul ditulis singkat dengan kata-kata atau frase kunci yang mencerminkan isi tulisan.
7. Sistematika penulisan secara garis besar memuat: Abstrak (meliputi: tujuan dan ruang lingkup penelitian, metode yang digunakan, ringkasan hasil, kesimpulan), Kata Kunci, Pendahuluan (meliputi: masalah dan ruang lingkup, status ilmiah dewasa ini, hipotesis cara pendekatan penyelesaian masalah, hasil yang diharapkan), Tinjauan teori, metodologi Penelitian, Pembahasan (meliputi: ada kesesuaian atau pertentangan dengan hasil litbang lain, adanya implikasi hasil litbang baik teori maupun penerapan). Kesimpulan dan saran, dan Daftar Pustaka (antara 30-50 referensi). Naskah tidak menyertakan catatan kaki, tetapi menggunakan catatan dalam (*parentical list*) yaitu nama pengarang diikuti tahun. Panjang naskah minimal 15 halaman.  
Contoh teks: Penulis harus banyak membaca (Parera, 2003).
8. Daftar Pustaka diketik berdasarkan urutan abjad, bukan nomor, dengan menuliskan nama pengarang (tanpa gelar), judul, nama penerbit, Kota Penerbit dan Tahun.
9. Redaksi menerima naskah dalam bentuk print out dan disket/CD. Disertai CV dan alamat lengkap penulis.
10. Isi tulisan di luar tanggungjawab redaksi. Redaksi berhak menyunting dari segi bahasa tanpa mengubah arti.
11. Keterangan lengkap dapat menghubungi PMIH UKI Jl. Diponegoro NO. 86 Jakarta 10430, Telp. (021) 3920174, Fax (021) 3920018.